

OTONOMI DAERAH, PENGUATAN POLITIK IDENTITAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL

Arif Budiman

ABSTRAKSI

Implementasi otonomi daerah di Indonesia memiliki dampak negatif sekaligus positif. Pada positifnya, kebijakan tersebut mendorong terjadinya pemerataan kesempatan dan akses bagi pembangunan ekonomi dan politik di daerah. Sedangkan negatifnya muncul manakala para pemimpin atau elite di daerah memahami kebijakan otonomi secara berlebihan dengan cara memperlakukannya sebagai 'penguasaan' sumber-sumber ekonomi dan jabatan-jabatan politik oleh orang asli daerah setempat dan menonjolkan identitas kedaerahan dalam bentuk simbol-simbol etnisitas maupun kegamaan.

Penguatan politik identitas ini, meski merupakan keniscayaan dalam negara majemuk, dapat mengancam integrasi nasional. Menonjolkan perbedaan dan mengabaikan persamaan dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya disintegrasi.

Melalui sebuah kajian kepustakaan, diketahui terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan agar kemajemukan tidak menjadi sumber perpecahan. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan cara menumbuhkan 'solidaritas emosional' dan 'solidaritas fungsional' serta mengembangkan common domain yang mengandung shared values demi menciptakan kebersamaan diantara warga negara

Kata kunci: *Otonomi Daerah, Politik Identitas, Integrasi Nasional, Solidaritas Emosional, Solidaritas Fungsional, Common Domain*

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah bangsa yang memiliki banyak suku, agama, ras, bahasa, dan adat istiadat, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam meramu keberagaman. Alih-alih menjadi sebuah kekuatan, jika tidak dikelola secara tepat dan benar keberagaman justru sewaktu-waktu malah menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial atau bahkan memicu disintegrasi nasional.

Sejak awal, para pendiri bangsa Indonesia telah menyadari akan realitas sosial politik masyarakat Indonesia yang sarat keragaman ini. Sebagai bukti, para pemimpin bangsa pada masa awal kemerdekaan telah berupaya merumuskan sebuah gagasan besar tentang cara pandang bangsa Indonesia tentang dunia yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Dengan rumusan tersebut, para pendiri bangsa menegaskan tekad untuk membangun sebuah masyarakat yang senantiasa terbuka dan bersedia untuk hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda latar belakang, baik agama, etnik, bahasa,

dan lain sebagainya. Dengan sikap mental tersebut, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bangsa besar yang disegani dapat lebih mudah dicapai.

Langkah lain yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan terkait upaya memperkokoh integrasi nasional adalah dengan cara mengakomodir berbagai kepentingan sosial dan politik dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kebijakan nyatanya adalah implementasi otonomi daerah. Melalui kebijakan tersebut diharapkan terjadi pemerataan akses dan kesempatan khususnya secara politik bagi setiap kelompok masyarakat yang hidup di Indonesia.

Sayangnya kebijakan tersebut kemudian banyak disalahpahami. Otonomi daerah tidak hanya dipahami sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah. Lebih dari itu, bagi banyak elite politik di daerah, kebijakan ini juga diperlakukan sebagai perumusan kembali dan penguatan garis-garis eksklusivisme dan parokhialisme. Akibatnya yang muncul kemudian adalah isu mengenai putra daerah, politik kesukuan, etnisitas birokrasi, politisasi agama, serta kebangkitan adat.

B. Identifikasi Masalah

Pemahaman yang kurang tepat mengenai penerapan otonomi daerah ini menggejala hampir di seluruh daerah otonom di Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota. Pada banyak kesempatan pemilihan kepala daerah, isu mengenai putra daerah, latar belakang etnis dan agama dari para kandidat masih sering ditemukan seperti yang muncul pada pemilukada di Kalimantan Barat, Lampung, dan DKI Jakarta. Demikian halnya dengan kebangkitan adat istiadat. Daerah saling berlomba menggali kembali identitas budaya dan adat istiadatnya. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Solo gencar menggelar festival kebudayaan lokal dalam bentuk kirab budaya, memakai baju batik dengan corak batik setempat, dan penggunaan bahasa lokal dalam berbagai acara resmi pemerintahan. Begitupun dengan daerah-daerah yang memiliki sejarah 'monarki' seperti Cirebon, Banjar, Ternate, Tidore, dan kerajaan-kerajaan lain yang dahulu pernah hidup di nusantara.

C. Perumusan Masalah

Berbagai fenomena penguatan politik identitas tersebut menarik perhatian peneliti untuk mencari penjelasan mengenai sejauh mana hal tersebut akan berdampak pada

kekokohan integrasi nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penguatan politik identitas di Indonesia berpengaruh terhadap kekuatan integrasi nasional?

D. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Peneliti menelusuri berbagai sumber/literatur yang berkaitan dengan politik identitas untuk kemudian menggunakannya sebagai alat analisa untuk menjelaskan pengaruh penguatan politik identitas terhadap integrasi nasional Indonesia

E. Tinjauan Teoritis

Otonomi daerah telah membawa implikasi yang sangat besar pada sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan tersebut juga membawa apa yang disebut Aspinal dan Fealy (dalam Sulistyono, 2010:2) sebagai implikasi bagi konfigurasi politik dan birokrasi di aras lokal. Distribusi kekuasaan ke tingkat lokal menjadikan kekuatan-kekuatan primordial menjelma menjadi sebuah kekuatan politik dan menjadi penentu arah kepentingan politik komunitas tertentu, baik berupa komunitas politik maupun kelompok kepentingan lainnya.

Kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat lokal yang masih dipengaruhi oleh sistem primordial etnisitas menjadikan politik identitas etnis menjelma sebagai daya tawar dalam arena politik dan birokrasi. Otonomi daerah yang seharusnya menempati domain hukum, bergeser menjadi domain politik akibat fragmentasi elit yang berbasis pada kesukuan mengedepankan politik identitas sebagai alat untuk mempercepat dan memperuncing dialektika wacana isu otonomi daerah.

Bagi elit, isu otonomi daerah layaknya dua keping mata uang, di satu sisi isu otonomi daerah merupakan ruang perebutan relasi kuasa, yaitu ruang untuk menjaga legalisasi pemerintah atas diri dan basis etnisitasnya melalui penguasaan birokrasi. Di sisi yang lain, kegagapan cara pandang masyarakat etnis tentang konsepsi elitnya yang mulai kabur akibat degradasi sistem modern dan demokrasi, menjadikan siapapun yang mampu merebut ruang kekuasaan pemerintahan dan menjadi elit politik, juga akan mendapatkan legitimasi ke-elit-an dalam sistem kultural etnis (Diputra, 2008)

Secara teoretis, Lawrence Pratchett dalam tulisannya *Local Autonomy, Local Democracy and the 'New Localism* sebagaimana dikutip Sulistiyono (2010:8)

mengemukakan, otonomi daerah dapat diinterpretasi dalam tiga dimensi: *freedom from*, *freedom to*, dan perefleksian (kebangkitan) identitas lokal. Interpretasi pertama menekankan pentingnya dimensi kewenangan yang dimiliki daerah atau diskresi, yang dimaknai bebas dari campur tangan pemerintah pusat. Kewenangan ini harus dijamin melalui penetapan ketentuan formal. Semakin besar kewenangan yang dimiliki daerah, berarti semakin besar pula otonominya. Tentu interpretasi ini bisa menjadi sensitif, terutama bila dikaitkan dengan konsep kedaulatan negara dan kebutuhan menjaga keutuhan wilayah, karena dengan penekanan pada *freedom from* seakan-akan setiap daerah ingin berdaulat sendiri-sendiri.

Kedaulatan negara dan kebutuhan menjaga keutuhan wilayah negara tentu mengharuskan campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat pasti tidak menghendaki ada daerah yang bebas sama sekali dari campur tangannya. Karena itu, dimensi ini tidak dipahami sebagai kewenangan penuh atas suatu wilayah, melainkan kewenangan (penuh) dalam urusan-urusan tertentu di wilayah yang bersangkutan. Ini pun masih memancing perdebatan.

Interpretasi kedua lebih menekankan pada dimensi fungsional atau pencapaian hasil (*outcomes*) tertentu, yaitu kemampuan daerah untuk memajukan atau mengembangkan daerah dengan mengidentifikasi permasalahan, menetapkan solusi, dan menggalang dukungan serta sumber daya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Dalam hal ini otonomi dimaknai bebas untuk memajukan daerah, bebas untuk berkreasi, dan bebas menggalang dukungan, tidak harus dengan memiliki kewenangan sendiri secara penuh, melainkan justru dengan kerjasama-kerjasama.

Sementara itu, interpretasi ketiga mengartikan otonomi daerah sebagai kesempatan untuk mengekspresikan identitas politik dan budaya daerah. Otonomi daerah memberi kesempatan dan peluang untuk partisipasi dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan sumber daya dengan sekaligus mengekspresikan cara-cara lokal, sehingga proses-proses politik lokal makin mengekspresikan dan mengaktualkan identitas politik lokal.

Agnes Heller, sebagaimana dikutip oleh Ubed Abdillah (2002:22), mengasumsikan politik identitas sebagai politik yang memfokuskan pembedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*) walaupun memunculkan polapola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis.

Identitas paling tidak bersumber pada agama, etnisitas, ras, bangsa, dan bahasa. Selain itu identitas juga bisa bersumber pada gender, profesi/pekerjaan, status sosial dan kelas ekonomi atau kategorisasi sosial lainnya. Pada setiap orang kategorisasi ini bisa hadir secara bersamaan satu persatu, sebagian kecil atau sebagian besar dari kategorisasi sosial tersebut.

Secara kontekstual, Frans Magnis-Suseno (2011) mengungkapkan bahwa “politik identitas” merupakan sebuah identitas primordial yang menjadi acuan dasar identitas seseorang dan oleh karena itu, orang itu akan mengambil sikap dan keputusan politik dari sudut keuntungan bagi kelompoknya yang sama identitasnya. Apabila identitas primordial itu adalah agama, maka orang itu pertama-tama merasakan diri sebagai warga agama dan bukan sebagai warga negara.

Giddens, seperti dikutip Adri (2011:80) membagi identitas kedalam dua kategori; identitas sosial dan identitas diri. Identitas sosial berasosiasi dengan hak-hak normatif, kewajiban, sanksi, yang pada kolektivitas tertentu, membentuk peran. Pemakaian tanda-tanda yang terstandarisasi, khususnya yang terkait dengan atribut badaniah umur dan gender, merupakan hal yang fundamental di semua masyarakat, sekalipun ada begitu banyak variasi lintas budaya yang dapat dicatat. Identitas sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh dunia sosial di mana dia hidup. Melalui dunia sosial ini orang jadi punya peran.

Giddens selanjutnya menjelaskan bahwa identitas diri (*self identity*) terbangun oleh kemampuan untuk melanggengkan narasi tentang diri, sehingga membangun suatu perasaan terus menerus tentang adanya kontinuitas biografis. Narasi identitas berusaha menjawab sejumlah pertanyaan kritis: “Apa yang harus dilakukan? Bagaimana bertindak? Dan ingin jadi siapa?”

Individu berusaha mengkonstruksi narasi identitas koheren di mana diri membentuk suatu lintasan perkembangan dari masa lalu sampai masa depan yang dapat diperkirakan. Jadi identitas bukanlah sifat distingtif, atau bahkan kumpulan sifat-sifat, yang dimiliki individu. Ini adalah diri sebagaimana yang dipahami secara refleksif oleh orang dalam konteks biografinya.

Lebih jauh Collins (dalam Adri, 2011:80) mengatakan bahwa identitas memiliki kandungan politis di dalamnya. Pengertian politis ini baik dari proses pembentukan identitas yang dipengaruhi oleh hal-hal yang politis, maupun penggunaannya dalam relasi-relasi yang bersifat politis. Pemikiran Collins berkembang dari situasi yang terjadi

di Amerika Serikat sebagai reaksinya atas *problem* rasisme terhadap kaum Negro dan kulit berwarna lainnya.

Identitas musti dipahami dalam konteks “kelainan” (*Others*) dan “pellainan” (*Othering*). Kedirian subyektif dan kolektif kita hanya mungkin dipahami dan dihadirkan dalam “perbedaan” kita dengan yang “lain.” Perbedaan kemudian membuat kita jadi bisa memahami di mana posisi sosial kita sebagai satu identitas tertentu. Menjadi Inggris mustilah dipahami dalam konteks adanya yang lain yaitu Jerman, Prancis, Belanda dan yang lain. Menjadi Negro mustilah dilihat dalam kehadiran adanya Asia yang Coklat dan Barat yang Putih.

Stuart Hall (dalam Adri, 2011:80) membedakan identitas dalam tiga cara yaitu *pertama*, sebagai subyek pencerahan yang memiliki kemampuan nalar dan bertindak dalam memahami dirinya. Identitas dalam artian ini berpusat pada diri subyektif; *kedua*, sebagai subyek sosiologis yang dibentuk dalam kaitan di luar kediriannya sebagai subyek pencerahan. Dia merupakan kedirian yang mengarah pada subyek-subyek lain yang berpengaruh terhadapnya yang menempatkan subyek dalam kerangka nilai, makna dan simbol, kebudayaan di sekitarnya. Dan yang *ketiga* adalah identitas sebagai subyek paskamodern yang menempatkan subyek sebagai yang sama sekali berbeda, yang merupakan kombinasi dari beragam sumber identitas dan tidak satu arah. Identitas adalah biografi subyektif yang utuh dalam keragaman dan keberbedaannya.

Meskipun mendapat banyak kritik, menurut Hall, identitas ini tidak pernah sepenuhnya hilang karena dia mengalami kemunduran yang sifatnya relatif. Sehingga identitas subyektif tetap ada dalam kedirian esensial kita. Identitas subyektif ini merupakan sebuah perjalanan yang berkesinambungan ketika dia bertemu dengan dunia di luar dirinya yang menjadi pusat kedirian subyektif ini. Pertemuan identitas ini kemudian mengalami penafsiran dan pemaknaan ulang mengenai kediriannya dan di mana posisi lokasi sosialnya dalam sebuah identitas kolektif.

Jika pada dua tipologi di atas identitas sebagai sesuatu yang cenderung konstan dan selalu dimantapkan, ditempatkan dan diperkuat, maka identitas sebagai subyek paskamodern merupakan subyek yang sekaligus kolektif secara bersamaan, sebagai proses yang tidak pernah berakhir, tidak pernah lengkap, selalu sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dimana kedirian orang selalu dibentuk ulang, ditafsir ulang, dinegosiasi ulang, secara kreatif. Kedirian subyektif dan kolektif tidak bersifat tunggal, tapi majemuk, lentur dan heterogen. Hall mencontohkan dirinya sendiri sebagai “Negro” yang mengacu pada Afrika, Karibia dan sekaligus Inggris yang telah berabad-abad hadir

di Inggris. Begitu juga Orang Inggris (Englandman) tidak sepenuhnya mereka adalah Kulit Putih yang hanya bersangkutan dengan Eropa. Inggris adalah orang-orang yang tidak pernah melewatkan hari-harinya tanpa secangkir teh. Tak ada teh dan gula yang tumbuh di daratan Britania Raya, semua berasal dari Afrika. Sehingga “gigi” Orang Inggris adalah sangat Afrika, sangat Negro.

F. Dinamika Politik Identitas di Indonesia

Sejarah Indonesia mencatat cukup banyak persoalan yang terkait dengan politik identitas. Konflik tersebut ada yang bersifat horizontal dan ada juga yang vertikal. Dari sisi horizontal, setidaknya ada tiga persoalan yang kerap terjadi di Indonesia yakni konflik agama, konflik antarsuku, dan konflik antarwilayah. Peristiwa konflik antarpemeluk agama di Ambon masih menyisakan trauma mendalam pada diri setiap penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Data lain menunjukkan bahwa sepanjang Orde Baru terdapat 609 gereja ditutup (paksa), dirusak dan dibakar. Nasib yang sama juga terjadi pada 55 buah mesjid. Periode paling menyedihkan adalah dalam kurun waktu 1985-1999 dimana terjadi penutupan (paksa), perusakan, dan pembakaran terhadap 48 mesjid dan 474 gereja (Santoso: 2000:112-113). Daniel Dakhidae (2003:514) menyebut kebijakan politik negara (Orde Baru) turut andil atas terjadinya berbagai peristiwa tersebut. Ia mengungkap motif negara dengan mengatakan bahwa Orde Baru telah menjadikan agama sebagai suatu diskursus yang diproduksi, dipilih dan dipilah, diorganisir bahkan didistribusikan oleh negara, untuk dijadikan alat mengamankan kekuasaan.

Dalam perspektif yang hampir mirip dengan Dakhidae, Budiman Sudjatmiko (2012:75) mengatakan bahwa kehadiran politik identitas pada masa kini merupakan antitesis dari kekuatan politik yang sentralistis dan hegemonik selama Orde Baru berkuasa. Kemunculan politik identitas secara massif direpresentasikan dengan munculnya beberapa kekuatan politik yang mengusung simbol dan ideologi Islam.

Selain konflik antarpemeluk agama, Indonesia juga kerap kali dihadapkan pada persoalan konflik antaretnis. Diantara yang paling mengesankan adalah konflik yang terjadi antara etnis Melayu dan Dayak dengan etnis Madura di Kalimantan Barat. Sepanjang periode 1996-2000 setidaknya telah terjadi tiga kali kerusuhan besar; *pertama*, kerusuhan Sanggau-Ledo yang berlangsung antara akhir tahun 1996 sampai awal 1997; *kedua*, kerusuhan Sambas yang terjadi pada awal tahun 1999, dan; *terakhir*, kerusuhan yang terjadi pada Oktober 2000 di Pontianak. Dari ketiga peristiwa tersebut ratusan orang

tewas, ribuan rumah terbakar, dan jumlah pengungsi mencapai ribuan orang. (Setiawan dan Nainggolan: 2001:3-6)

Belakangan, kemunculan berbagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama turut memperkuat wajah politik identitas di Indonesia. Organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan semacamnya yang senantiasa hadir dengan tampilan radikal dan eksklusif senantiasa mendominasi atmosfer politik Indonesia.

Menurut Siti Musdah Mulia (2012:45-46), arus politik identitas umat Islam, terutama yang digawangi oleh kelompok fundamentalis, paling tidak telah melahirkan tiga bentuk kekerasan. *Pertama*, kekerasan fisik seperti pengrusakan, penutupan tempat ibadah, seperti gereja dan masjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan obyek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma, maupun terbunuh. *Kedua*, kekerasan simbolik, yang dapat berupa kekerasan semiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah yang bernada melecehkan sesuatu agama. *Ketiga* kekerasan struktural, yang berbentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun aparatnya sendiri.

Lebih lanjut Mulia mengatakan bahwa Politik identitas yang dibangun dan bermunculan di banyak wilayah di Indonesia memperlihatkan kecenderungan dua pola, yaitu positif dan negatif atau bahkan destruktif. Untuk pola yang kedua tampak pada kelompok-kelompok Islam yang mengukuhkan identitasnya dengan menafikan, menyingkirkan, dan memberantas yang lain. Logika seperti ini dikembangkan berdasarkan apa yang disebut Jacques Derrida sebagai prinsip "oposisi biner" atau Michel Foucault sebagai "logika strategis" seperti modern-tradisional, superior-inferior, mayoritas-minoritas, Barat-Timur, Islam-kafir (sesat), dan lain sebagainya.

Terlepas dari itu semua, sejatinya politik identitas merupakan sebuah keniscayaan sepanjang tidak merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan mengancam integrasi nasional. Keberadaan sebuah bangsa, sebagaimana dikemukakan oleh Ernest Renan (dalam Prasodjo, 2001: 190) hanya mungkin terjadi bila ia memiliki suatu nyawa, suatu asas-akal, yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya yang menjalani satu kesatuan riwayat, dan sekarang memiliki kemauan, keinginan hidup menjadi satu.

Terkait hal tersebut, Bung Karno (dalam Prasodjo, 2001:190) berpendapat bahwa keinginan hidup menjadi satu bangsa itu dasarnya bukan nasionalisme sempit atas kesatuan ras, bahasa, agama, persamaan butuh, ataupun sekedar batas-batas negeri, namun lebih didasarkan pada nasionalisme yang longgar, nasionalisme yang luhur,

nasionalisme yang mementingkan kesejahteraan manusia Indonesia, dan yang mengutamakan persahabatan dengan semua kelompok (inklusif). Proses *nation building* inilah yang pada gilirannya nanti sangat berguna bagi penguatan integrasi nasional.

Penguatan integrasi nasional, menurut Prasodjo (2001:192) dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain; *pertama*, melalui pengelolaan kreatif untuk menumbuhkan “solidaritas emosional” dalam bingkai kebangsaan. Setiap kelompok memahami budaya kelompok lain sehingga muncul sensitivitas dalam berinteraksi. Selain itu, pengelolaan negara juga harus diarahkan sedemikian rupa sehingga kebijakan-kebijakan yang dijalankan tidak menciptakan rasa keterbuangan (*marginal*) dalam diri tiap-tiap warga negara.

Kedua, *nation building* harus dilanjutkan dengan melakukan pengelolaan kehidupan bernegara sedemikian rupa sehingga menumbuhkan “solidaritas fungsional”, yakni solidaritas yang didasarkan pada ikatan saling ketergantungan (interdependensi) satu sama lainnya, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

Selain dua strategi diatas, penguatan integrasi nasional juga bisa dilakukan dengan cara mengembangkan *common domain* yang mengandung *shared values* untuk dijadikan sebagai representasi kolektif. Christine Drake (dalam Pariela, 2011:102) menyebutkan empat faktor yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk membangun *common domain*, yaitu (1) kesamaan sejarah dan politik berbangsa; (2) kesamaan atribut-atribut sosial budaya; (3) interaksi di antara komunitas-komunitas yang mempunyai beraneka ragam atribut sosial budaya; dan (4) saling ketergantungan dan kesetaraan ekonomi antar daerah.

G. Kesimpulan dan Saran

Politik identitas adalah keniscayaan dalam sebuah bangsa yang majemuk. Penguatan politik identitas dapat bermakna positif atau sebaliknya negatif atau bahkan destruktif terhadap bangunan integrasi nasional. Untuk membuatnya positif maka diperlukan kesediaan dari tiap-tiap kelompok masyarakat untuk memahami kelompok lain sehingga tercipta interaksi yang konstruktif. Selain itu, pemerintah juga mesti menghindari kebijakan yang berpotensi menghadirkan marginalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang pada tahapan berikutnya dapat memicu ‘pemberontakan’ akibat perlakuan yang tidak adil. Berikutnya, perlu adanya upaya untuk mengembangkan *common domain* sebagai sarana menciptakan kebersamaan diantara warga negara. Dengan begitu, integrasi nasional dapat tetap dipertahankan.

Daftar Pustaka

- Adri. 2011. *Kontestasi Politik Identitas dalam Fenomena Illegal Logging di Perbatasan Indonesia-Malaysia*. Jurnal Communication Spectrum, Vol. 1 No. 1, Februari-Juli 2011. ISSN : 2087-8850
- Abdillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: IndonesiaTera
- Bhakti, Ikrar Nusa dan Riza Sihbudi (ed.), 2002, *Kontroversi Negara Federal*, Penerbit: Mizan, Bandung
- Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Diputra, Yadi Surya. 2008. *Analisa Kekuatan Politik Etnisitas dalam Proses Pemekaran Provinsi Sumbawa*. Makalah yang disampaikan dalam seminar internasional PERCIK ke-9 dengan tema Dinamika Politik Lokal di Indonesia "Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara" yang dilaksanakan pada 15 Juli 2008 di Kampoeng Percik Salatiga
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Yayasan Abad Demokrasi. Jakarta
- Santoso, Thomas., Paul Tahalele., Frans Parera (ed). 2000. *Indonesia di Persimpangan Kekuasaan, Dominasi Kekerasan Atas Dialog Publik*. Go-East Institute dan Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI). Surabaya
- Setiawan, Bambang dan Bestian Nainggolan. 2001. *Sosok Negeri Sarat Konflik Identitas. Dalam Indonesia 2001 kehilangan Pamor*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Sulistiyono, Djoko. 2010. *Representasi Etnis dalam Birokrasi: Pergulatan Demokrasi di Aras Lokal*. Hasil Penelitian. Balitbang Kemendagri, Jakarta
- Suseno, Frans Magnis. 2011. *Agama dan Politik Identitas*. Diskusi Panel "Politik Identitas", Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, 25 Mei 2011
- Jurnal Masyarakat Indonesia Jilid XXIX No. 2 Tahun 2003, diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Penerbit: LIPI Press, Jakarta